



DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2018



Buku Profil
GENDER DAN ANAK
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-NYA kepada kita semua, sehingga Tim Penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku **“Profil Genre dan Anak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018”**. Serta Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan buku ini dilakukan dalam rangka menyediakan data dan informasi gender dan anak di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018. Dalam buku ini disajikan profil perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan. Buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Dharmasraya.

Dalam penyusunan buku ini kami memperoleh dukungan/bantuan dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu pada kesempatan ini Tim Penulis menghaturkan terimakasih kepada :

1. Bapak/Ibu kepala SKPD instansi vertikal, Organisasi Perempuan, dan LSM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang telah memfasilitasi ketersediaan data dan informasi gender dan anak sesuai dengan tupoksi masing-masing,
2. Bapak/Ibu anggota kelompok kerja data terpilah gender dan anak Kabupaten Dharmasraya tahun 2018 yang telah berpartisipasi aktif dalam memberikan sumbang saran/pemikiran dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan buku ini.

Semoga semua dukungan dan bantuan yang diberikan menjadi amal shaleh disisi-NYA. Kami menyadari bahwa penulisan buku ini belum sempurna. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaannya kedepan.

Pulau Punjung, September 2018

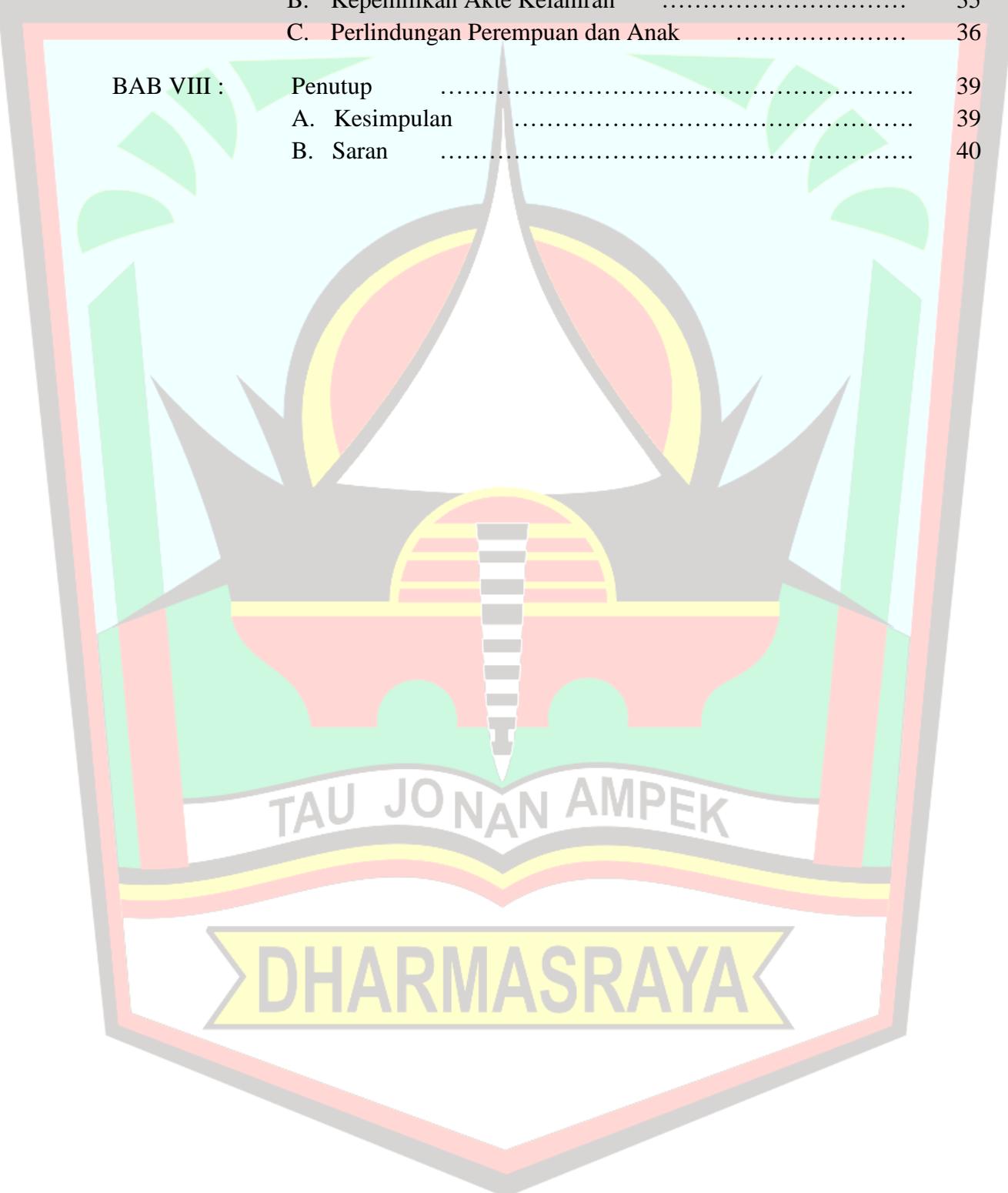
KEPALA DINAS SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I : Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Sumber Data	4
D. Sistematika Penyajian	4
BAB II : Struktur Penduduk	7
A. Penduduk Menurut Jenis Kelamin	7
B. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	9
C. Penduduk Produktif	10
BAB III : Pendidikan	12
A. Angka Partisipasi Kasar	13
B. Angka Partisipasi Murni	15
C. Angka Melek Huruf	16
BAB IV : Kesehatan dan Keluarga Berencana	18
A. Angka Harapan Hidup	19
B. Angka Kematian Ibu dan Cakupan Pertolongan	
Persalinan dan	20
C. Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4)	22
D. Penderita HIV/AIDS	23
E. Keluarga Berencana'	24
F. Pengguna Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif	
lainnya (NAPZA)	25
BAB V : Ketenagakerjaan	26
A. Penyedia Lapangan Kerja	26
B. Pekerja Perempuan	28
BAB VI : Perempuan di Sektor Publik	29
A. Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif	29
B. Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif	31
C. Partisipasi Perempuan di Lembaga Yudikatif	32
D. Organisasi Perempuan	33

BAB VII :	Kesejahteraan Perempuan dan Perlindungan Anak	34
A.	Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
	Jalur Formal dan Non-Formal	34
B.	Kepemilikan Akte Kelahiran	35
C.	Perlindungan Perempuan dan Anak	36
BAB VIII :	Penutup	39
A.	Kesimpulan	39
B.	Saran	40



TAU JO NAN AMPEK

DHARMASRAYA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Dharmasraya Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017	8
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017	9
Tabel 3.1	Jumlah Perempuan Melek Huruf Usia 15 Tahun ke Atas Kabupaten Dharmasraya	17
Tabel 4.1	Jumlah kematian ibu melahirkan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017	20
Tabel 4.2	Pertolongan persalinan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017	21
Tabel 4.3	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017	23
Tabel 4.4	Jumlah Peserta KB Aktif di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017	25
Tabel 5.1	Pencari Kerja Terdaftar Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2017	27
Tabel 5.2	Kapasitas Perusahaan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017	28
Tabel 5.3	Pekerja Perempuan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017	28
Tabel 6.1	Jumlah Partisipasi Perempuan di Pemilihan Legislatif di Kabupaten Dharmasraya Tahun Pileg periode 2014-2019	30
Tabel 6.2	Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2017	32
Tabel 7.1	Jumlah Anak berumur 18 Tahun dengan kepemilikan akte kelahiran di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Sex Ratio Kabupaten Dharmasraya tahun 2012-2017	8
Gambar 2.2	Piramida Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 ...	10
Gambar 2.3	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017	10
Gambar 2.4	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif dan Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya tahun 2017	11
Gambar 3.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenis kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017	14
Gambar 3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenis kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017	15
Gambar 4.1	Angka Harapan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012-2017.....	19



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gender diartikan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Perbedaan tersebut pada prakteknya sering menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan naik di lingkungan rumah tangga, pekerjaan masyarakat, kultur, maupun negara. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan ketidakadilan tersebut diperlukan adanya kesetaraan dan keadilan *gender* dalam proses bermasyarakat dan bernegara.

Kesetaraan *Gender* (*gender equity*) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Jadi kesetaraan gender bukan hanya dimaknai dari segi perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan saja. Sementara itu, keadilan gender (*gender equality*) merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki peluang dan

kesempatan untuk menggunakan sumberdaya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Sedangkan memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya.

Sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan Nasional bahwa setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Penduduk Kabupaten Dharmasraya tahun 2017 hasil proyeksi penduduk sebanyak 207.883 ribu jiwa yang terdiri dari 105.915 ribu jiwa laki-laki dan 101.968 ribu jiwa perempuan dengan pertumbuhan 2,95 persen per tahun. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 103,87.. Struktur umur penduduk Kabupaten Dharmasraya termasuk umur muda (0-18 tahun) karena rasio-nya 38,11 persen sedangkan untuk usia tua (65 tahun ke atas) hanya 2,9 persen. Hal ini menunjukkan bahwa investasi untuk anak adalah berinvestasi untuk lebih dari sepertiga penduduk Kabupaten Dharmasraya. Gambaran kondisi anak saat ini menjadi dasar yang penting bagi pengambilan kebijakan yang tepat bagi anak. Anak-anak merupakan kelompok usia muda yang memiliki potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah di masa yang akan datang. Mereka adalah kelompok yang harus dipersiapkan untuk menjaga kelangsungan negara dan bangsa di masa depan.

Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak diperlukan data terpisah sebagai pembuka wawasan, sekaligus sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak anak. Mengingat pentingnya data ini dalam proses perencanaan, maka Pemerintah didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 13 ayat 1 yang mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang.

Data dan informasi yang dimaksud akan diompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan data serta analisis secara sistematis dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.

Terkait dengan hal tersebut, maka disusun buku “**Profil Gender dan Anak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018**” sebagai gambaran keadaan perempuan dan anak di Kabupaten Dharmasraya secara menyeluruh di berbagai bidang.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan buku profil gender dan kesejahteraan perlindungan anak adalah menyajikan data terpisah yang dapat menginformasikan lebih jelas kondisi perempuan dibanding laki-laki terkait dengan masalah kependudukan, karakteristik, rumah tangga, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, ketenagakerjaan, sektor publik, kekerasan terhadap perempuan, sosial

ekonomi lainnya, dan kesulitan fungsional penyandang disabilitas, serta memberikan gambaran dan informasi tentang gambaran dan informasi tentang kondisi anak di Kabupaten Dharmasraya yang diamati dari aspek lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak baik masalah sosial, hukum, kekerasan, anak bekerja dan anak disabilitas.

C. Sumber Data

Data-data yang disajikan dalam buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 ini diperoleh dari berbagai sumber yaitunya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya, KPU Kabupaten Dharmasraya, Kepolisian Resort Dharmasraya, Kejaksan Negeri Dharmasraya dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya.

D. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Sumber Data
- D. Sistematika Penyajian

BAB II : Struktur Penduduk

- A. Penduduk Menurut Jenis Kelamin
- B. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
- C. Penduduk Produktif

BAB III : Pendidikan

- A. Angka Partisipasi Kasar
- B. Angka Partisipasi Murni
- C. Angka Partisipasi Sekolah

- BAB IV :
- D. Angka Melek Huruf
 - E. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
 - Kesehatan dan Keluarga Berencana
 - A. Angka Harapan Hidup
 - B. Angka Kematian Ibu
 - C. Cakupan Pertolongan Persalinan
 - D. Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4)
 - E. Penderita HIV/AIDS
 - F. Keluarga Berencana'
 - G. Usia Perkawinan Pertama
 - H. Pengguna Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya (NAPZA)

- BAB V :
- Ketenagakerjaan
 - A. Penduduk Usia Kerja
 - B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
 - C. Penduduk yang Bekerja
 - D. Status Pekerjaan
 - E. Lowongan dan Penempatan Kerja

- BAB VI :
- Perempuan di Sektor Publik
 - A. Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif
 - B. Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif
 - C. Partisipasi Perempuan di Lembaga Yudikatif
 - D. Organisasi Perempuan

- BAB VII:
- Hukum dan Sosial Budaya
 - A. Penghuni Lembaga Permasarakatan
 - B. Penduduk Lanjut Usia
 - C. Penyandang Cacat
 - D. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
 - E. Perempuan Kepala Rumah Tangga

- BAB VIII:
- Kesejahteraan Perlindungan Anak
 - A. Tumbuh Kembang Anak
 - 1. Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal dan Non-Formal
 - 2. Lembag/Kelompok PAUD Jalur Formal dan Non-Formal
 - B. Kelangsungan Hidup Anak
 - 1. Angka Kematian Bayi (AKB)
 - 2. Angka Kematian Balita (AKBA)
 - 3. Status Imunisasi
 - 4. Pemberian Air Susu Ibu (ASI)
 - 5. Balita dengan Gizi Kurang dan Gizi Buruk
 - 6. Anak yang Menggunakan NAPZA
 - 7. Kepemilikan Akte Kelahiran

- C. Perlindungan Anak
 - 1. Anak Jalanan
 - 2. Pekerja Anak
 - 3. Anak Terelantar
 - 4. Anak Bermasalah Hukum

BAB IX :

- Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
- A. Kekerasan Terhadap Perempuan
 - B. Kekerasan Terhadap Anak

BAB X :

- Penutup
- A. Kesimpulan
 - B. Saran

TAU JO NAN AMPEK

DHARMASRAYA

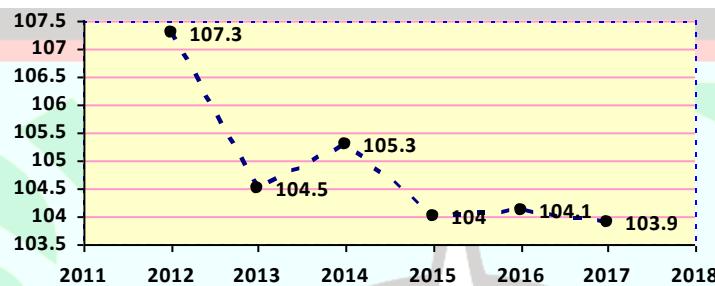
BAB II

STRUKTUR PENDUDUK

Penduduk merupakan komponen utama dalam pembangunan nasional suatu bangsa. Penduduk merupakan sumber daya manusia yang melakukan dan melaksanakan pembangunan sekaligus menjadi objek atau sasaran pembangunan itu sendiri. Dengan kata lain, penduduk berfungsi sebagai komponen input sekaligus juga sebagai komponen output dalam pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan penduduk perlu diarahkan kepada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengarahan mobilitas sehingga mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menunjang kegiatan pembangunan. Permasalahan pendudukan seperti jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin harus selalu dipantau perkembangannya.

A. Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Proyeksi penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Dharmasraya sebanyak 207.883 ribu jiwa yang terdiri dari 105.915 ribu jiwa laki-laki dan 101.968 ribu jiwa perempuan dengan pertumbuhan 2,95 persen per tahun. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 103,87. Artinya dalam 100 penduduk perempuan terdapat 107 penduduk laki-laki. Angka *sex ratio* yang lebih besar dari 100 ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih sedikit dari jumlah penduduk laki-laki. Seperti yang terlihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2.1
Sex Ratio Kabupaten Dharmasraya tahun 2012-2017
Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Dharmasraya

Pada Gambar 2.1 menunjukkan bahwa Sex Ratio Kabupaten Dharmasraya terus mengalami turun-naik dari tahun 2012 hingga tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi laki-laki dan perempuan tidak bisa diprediksi.

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Kabupaten Dharmasraya Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Koto Baru	15074	14801	29875	101,84
2.	Pulau Punjung	20118	19339	39457	104,02
3.	Sungai Rumbai	10651	10157	20808	104,86
4.	Sitiung	13068	12548	25616	104,14
5.	IX Koto	4308	4138	8446	104,10
6.	Timpeh	7905	7564	15469	104,50
7.	Koto Salak	8458	8248	16706	102,54
8.	Tiumang	6275	5999	12274	104,60
9.	Padang Laweh	2889	2779	5668	103,95
10.	Asam Jujuhan	4145	3811	7956	108,76
11.	Koto Besar	13024	12584	25608	103,49

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan tabel 2.1 diatas dapat dilihat bahwa penduduk terbanyak di kecamatan Pulau Punjung yaitunya berjumlah 39.875 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Padang Laweh dengan 5.668 jiwa.

B. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Distribusi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Tabel 2.2 menunjukkan bahwa struktur umur penduduk Indonesia didominasi oleh penduduk muda yang ditandai dengan bagian bawah piramida yang relatif lebar. Frekuensi terbesar untuk penduduk laki-laki maupun perempuan berada pada kelompok umur 0-4 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kelahiran pada periode 5 tahun terakhir cukup tinggi.

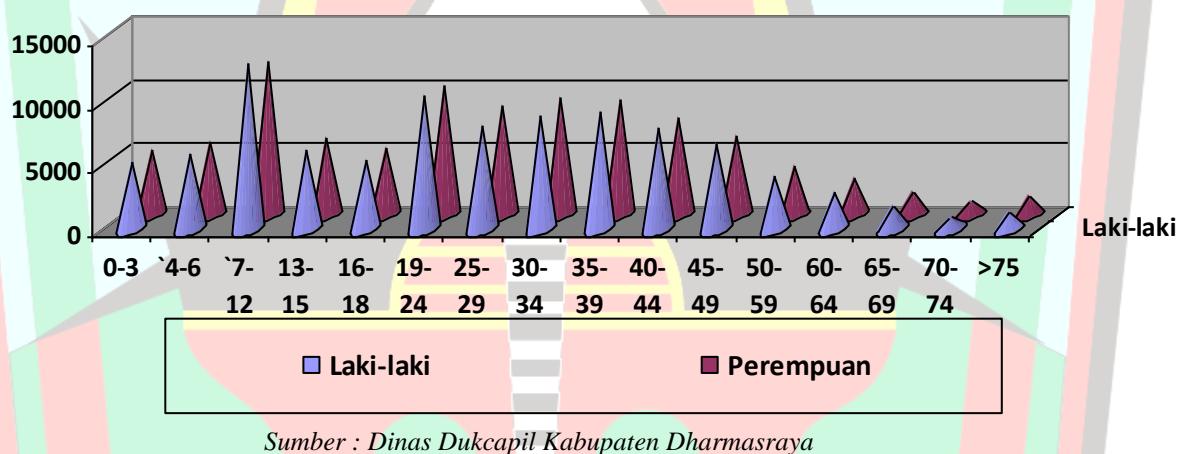
Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 – 3	5439	5145	10584
2.	4 – 6	6031	5867	11896
3.	7 – 12	13127	12127	25254
4.	13 – 15	6355	6036	12391
5.	16 – 18	5604	5385	10989
6.	19 – 24	10623	10149	20772
7.	25 – 29	8278	8645	16923
8.	30 – 34	9069	9247	18316
9.	35 – 39	9413	9113	18526
10.	40 – 44	8080	7706	15786
11.	45 – 49	6814	6338	13152
12.	50 – 59	4356	3964	10252
13.	60 – 64	3113	2878	5971
14.	65 – 69	1969	1830	3799
15.	70 – 74	944	1109	2053
16.	>75	1375	1502	2877
Kabupaten Dharmasraya		105915	101968	207883

Piramida penduduk Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada gambar 2.2 yang menunjukkan bahwa sebanyak 71.114 (34,2 %) jiwa penduduk Kabupaten Dharmasraya berstatus anak (usia 0-18 tahun) dimana sebanyak 34.560 (16,62 %) merupakan anak perempuan. Sedangkan penduduk lanjut usia

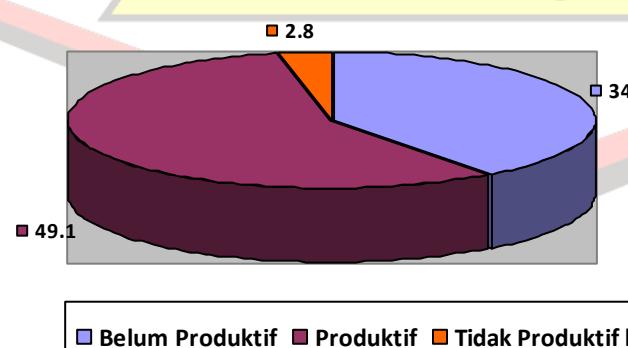
sebanyak 2.877 (1,38 %) jiwa dan sebanyak 1502 (0,72 %) jiwa merupakan lansia perempuan. Dengan tingginya persentase penduduk Kabupaten Dharmasraya usia 0-19 tahun maka seyogyanya diperlukan kebijakan dan program-program pembangunan yang difokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Gambar 2.2
Piramida Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017



C. Penduduk Produktif

Komposisi penduduk menurut kelompok umur produktif digolongkan menjadi tiga, yaitu belum produktif (0 – 14), produktif (15 - 65), dan tidak produktif lagi (65 tahun ke atas).

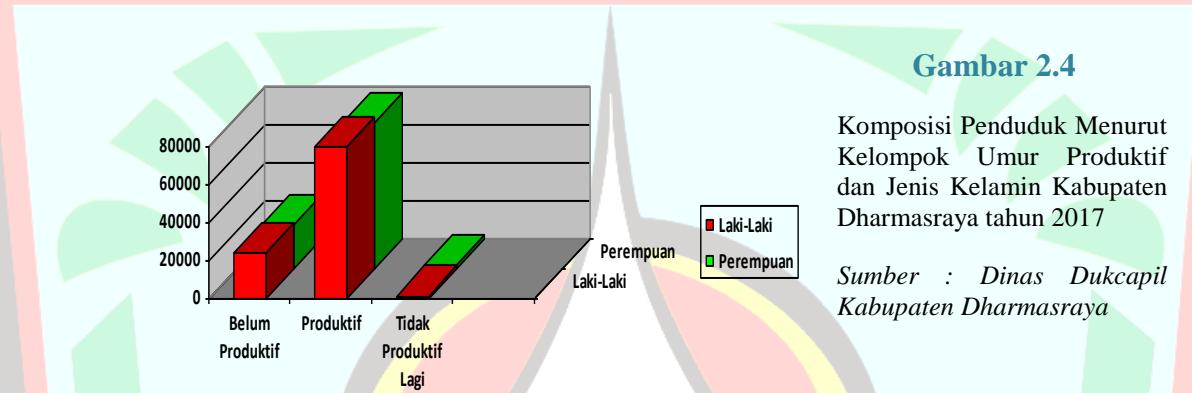


Gambar 2.3

Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

Sumber : Dinas Dukcapik Kabupaten Dharmasraya

Gambar 2.3 menunjukkan bahwa sebanyak usia belum produktif penduduk Kabupaten Dharmasraya sebanyak 34,2 persen, usia produktif sebanyak 49,1 persen, dan usia tidak produktif lagi sebanyak 2,8 persen.



Gambar 2.4

Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif dan Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya tahun 2017

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Dharmasraya

Gambar 2.4 menunjukkan bahwa komposisi penduduk usia produktif lebih didominasi oleh laki-laki dengan perbandingan laki-laki 38,45 persen dan perempuan 37,19 persen. Namun untuk usia tidak produktif didominasi oleh perempuan dengan 0,72 persen dan laki-laki sebanyak 0,66 persen.

TAU JO NAN AMPEK

DHARMASRAYA

BAB III

PENDIDIKAN

Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak terlepas dari dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. SDM yang berkualitas salah satunya dapat diukur dari kualitas pendidikan, baik secara formal maupun non-formal. Pendidikan formal dititikberatkan pada peningkatan peningkatan mutu pendidikan dengan berbagai cara seperti perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar dan menengah baik umum maupun kejuruan serta perluasan layanan pendidikan tinggi. Demikian pula peningkatan ketersediaan informasi pendidikan, pengembangan budaya baca, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, khususnya bagi perempuan dan anak. Sementara pendidikan non formal bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat dalam mencapai program wajib belajar 9 tahun.

Indikator pendidikan seperti Angka Melek Huruf, status pendidikan, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan indicator yang dapat menunjukkan tingkat kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya bagi perempuan dan anak. Semakin tinggi pendidikan dan rata-rata lama sekolah bagi perempuan akan berdampak pada kemampuan pola pikir dan tingkat kesejahteraannya. Perempuan yang berkualitas diharapkan juga dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pembentukan karakter serta peningkatan kesejahteraan keluarga dan bangsa.

Kesempatan memperoleh pendidikan diberikan kepada seluruh masyarakat baik laik-laki maupun perempuan, agar kelak pembangunan dapat dilaksanakan oleh penduduk dengan kualitas pendidikan yang baik tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk perempuan yang hamper seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki akan sangat potensial apabila diberdaya-gunakan. Tanpa mengesampingkan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan yang bertanggungjawab terhadap keluarga, maka peran perempuan untuk menciptakan kader-kader bangsa memegang peranan yang sangat penting sebagai ibu dari anak-anak. Ibu yang berpendidikan diharapkan akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas.

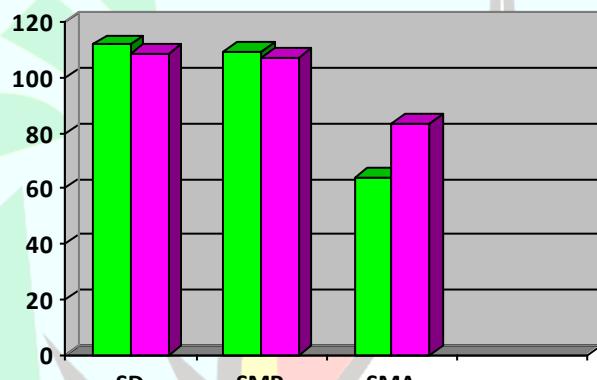
Bagaimana peran serta perempuan dalam pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan serta sampai seberapa jauh pendidikan telah diakses oleh perempuan akan diulas pada Bab ini. Data dan informasi yang disajikan diharapkan dapat mengidentifikasi sebagian besar profil perempuan dan anak di bidang pendidikan dalam membantu mengambil keputusan untuk kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

A. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapa-pun usianya) terhadap jumlah usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

APK dihgunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi

penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.



Gambar 3.1

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenis kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017
Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten DHarmasraya

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa jumlah anak di Kabupaten Dharmasraya yang sedang bersekolah tahun 2017 pada setiap jenjang pendidikan. APK pendidikan Kabupaten Dharmasraya untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) melebihi nilai 100 persen, yaitu 111,67 persen untuk laki-laki dan 108,54 persen untuk perempuan. Hal ini mengindikasikan populasi murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Adanya siswa dengan usia yang lebih tua dibandingkan usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibandingkan usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

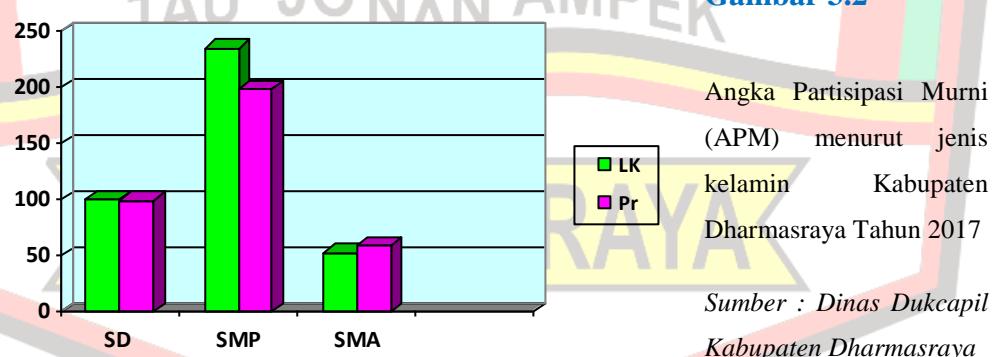
APK cenderung menurun pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan APK laki-laki relative lebih rendah dibandingkan APK perempuan pada pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas.

B. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat usianya, maka APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dengan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya *under estimate* karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

Gambar 3.2



Gambar 3.2 menunjukkan bahwa APM Kabupaten Dharmasraya yang bersekolah tepat waktu pada jenjang pendidikan SD adalah 99,54 persen laki-laki dan 98,90 persen perempuan. Angka tersebut menunjukkan peningkatan pada tingkat SMP dan jauh menurun pada tingkat SMA yaitunya 52,50 persen untuk laki-laki dan 59,09 persen perempuan.

C. Angka Melek Huruf

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mampu membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Tingkat buta huruf yang rendah menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya.

Kemampuan membaca dan menulis diperlukan agar setiap orang dapat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mengembangkan diri dan kehidupannya menjadi lebih baik. Pada tahun 2017, berdasarkan data dari Dinas Dukcapil Kabupaten Dharmasraya tercatat dari total 151.854 jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya yang berusia 15 tahun keatas tercatat 77.055 jiwa laki-laki dan 74.799 perempuan mengalami buta huruf.

Tabel 3.1

Jumlah Perempuan Melek Huruf Usia 15 Tahun ke Atas Kabupaten Dharmasraya

No.	Kecamatan	Jumlah Perempuan Usia >15 Tahun	Jumlah Perempuan Melek Huruf Usia >15 Tahun
1.	Koto Baru	10881	10763
2.	Pulau Punjung	13995	13635
3.	Sungai Rumbai	7291	7190
4.	Sitiung	9388	9205
5.	IX Koto	2938	2750
6.	Timpeh	5543	5330
7.	Koto Salak	6303	6137
8.	Tiumang	4482	4400
9.	Padang Laweh	2008	1907
10.	Asam Jujuhan	2775	2660
11.	Koto Besar	9195	9101

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Dharmasraya

BAB IV

KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Salah satu upaya pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan perempuan adalah di bidang kesehatan dan Keluarga Berencana (KB). Kesehatan perempuan dapat diukur berdasarkan kualitas fisik perempuan melalui indikator Angka Harapan Hidup perempuan dapat diukur melalui indicator angka kesakitan (*morbidty rate*) yaitu penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktifitasnya disertai jenis-jenis keluhannya. Untuk melihat gambaran tentang upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi perempuan dapat dilihat melalui akses penduduk perempuan ke pelayanan kesehatan, melalui cara berobat, jenis-jenis obat yang digunakan, dan fasilitas tempat berobat.

Program KB juga merupakan upaya pemerintah dalam mendukung kesejahteraan perempuan dan menekan laju pertumbuhan penduduk. Indikator yang digunakan meliputi status pemakaian alat/cara KB, jenis-jenis alat KB yang digunakan meliputi status pemakaian alat/cara KB, Jenis-jenis alat KB yang digunakan dan anak lahir hidup. Sementara itu usia perkawinan pertama dapat mempengaruhi seseorang dalam status pemakaian alat/cara KB. Semakin rendah usia perkawinan pertama seorang perempuan, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan dan proses melahirkan. Hal ini disebabkan belum siapnya perempuan secara fisik dan mental dalam menghadapi masa kehamilan dan melahirkan. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan peran serta perempuan secara langsung untuk mendukung program KB, yaitu pemakaian alat kontrasepsi.

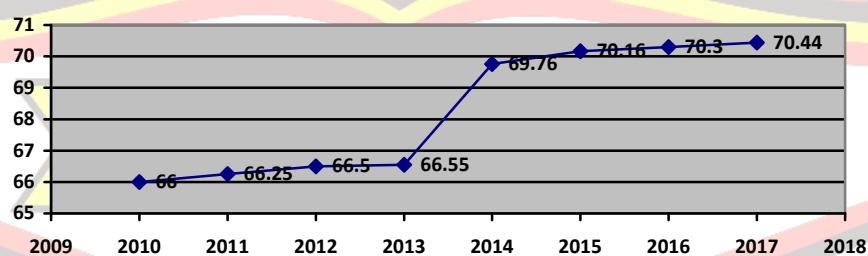
A. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AKH) adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Data AKH di suatu negara berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. Umur harapan hidup merupakan salah satu indicator yang digunakan dalam menentukan *Human Development Index* (HDI). Peningkatan kesejahteraan ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat.

AKH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AKH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Gambar 4.1

Angka Harapan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012-2017



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya

Gambar 4.1 menunjukkan AKH penduduk Kabupaten Dharmasraya terus mengalami peningkatan sejak tahun 2012. Pada tahun 2017, AKH

penduduk Kabupaten Dharmasraya adalah 70,44 tahun. Hal ini berarti bayi yang lahr pada tahun 2017 diperkirakan rata-rata akan hidup selama 70 hingga 71 tahun dengan asumsi besarnya angka kematian atau kondisi kesehatan menurut umur tidak berubah.

B. Angka Kematian Ibu dan Cakupan Pertolongan Persalinan

Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain per 100.000 kelahiran hidup seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain.

Secara Nasional hasil SKDI 2012, Angka Kematian Ibu (AKI) Indonesia mengalami peningkatan dari 228 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2017 menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2012. Sedangkan untuk Sumatera Barat AKI menurun menjadi 108 per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel 4.1

Jumlah kematian ibu melahirkan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

No.	Kecamatan	Jumlah Kematian Ibu
1.	Pulau Punjung	2
2.	IX Koto	0
3.	Sitiung	3
4.	Timpeh	0
5.	Koto Baru	1
6.	Koto Salak	0

7.	Padang Laweh	0
8.	Tiumang	0
9.	Sungai Rumbai	0
10.	Koto Besar	1
11.	Asam Jujuhan	1
Jumlah		8

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya

Dari table diatas dapat kita lihat bahwa jumlah kematian ibu saat melahirkan di Kabupaten Dahrmasraya tahun 2017 masih sangat rendah yaitunya hanya 8 orang atau sekitar 0,2 persen dari total persalinan yang sudah dilakukan baik dari proses persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan maupun tradisional (dukun) atau proses persalinan lainnya.

Sedangkan untuk pertolongan persalinan yang diberikan kepada ibu hamil di Kabupaten Dharmasraya masih didominasi oleh pertolongan tenaga kesehatan.

Tabel 4.2
Pertolongan persalinan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

No.	Kecamatan	Jumlah Kematian Ibu		
		Tenaga Kesehatan	Dukun	Lainnya
1.	Pulau Punjung	706	1	—
2.	IX Koto	148	3	—
3.	Sitiung	455	4	—
4.	Timpeh	254	2	—
5.	Koto Baru	570	12	—
6.	Koto Salak	346	0	—
7.	Padang Laweh	112	0	—

8.	Tiumang	222	0	-
9.	Sungai Rumbai	353	0	-
10.	Koto Besar	476	13	-
11.	Asam Jujuhan	134	16	-
Jumlah		3776	51	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya

C. Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4)

K1 adalah cakupan ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator akses ini digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan antenatal serta kemampuan program dalam menggerakkan masyarakat.

K1 adalah kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk mendapatkan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak pertama ini harus dilakukan sedini mungkin pada trimester pertama sebaiknya minggu ke 8 dan pada saat kunjungan ini ibu juga diberikan buku KIA sebagai pedoman para ibu dimulai dari kehamilan sampai pasca persalinan.

Sedangkan k4 adalah kontak ibu hamil sebanyak 4 (empat) kali atau lebih dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk memberikan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak 4 (empat) kali ini dilakukan dengan rincian 1 (satu) kali pada trimester I (kehamilan hingga 12 minggu) dan trimester ketiga (>12-24 minggu), kemudian minimal 2 (dua) kali kontak pada trimester ketiga dilakukan setelah minggu ke 24 sampai umur 36 minggu. Kunjungan antenatal ini bisa lebih dari 4 (empat) kali sesuai dengan kebutuhan dan jika keluhan, penyakit, atau gangguan kehamilan.

Tabel 4.3

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

No.	Kecamatan	Jumlah Kematian Ibu	
		K1	K4
1.	Pulau Punjung	890	705
2.	IX Koto	159	127
3.	Sitiung	481	422
4.	Timpeh	295	225
5.	Koto Baru	639	480
6.	Koto Salak	467	406
7.	Padang Laweh	123	109
8.	Tiumang	210	211
9.	Sungai Rumbai	438	361
10.	Koto Besar	519	484
11.	Asam Jujuhan	219	167
Jumlah		4440	3697

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya

D. Penderita HIV/AIDS

Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* yang menular dan mematikan. Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh manusia yang menyebabkan hilang/turunnya daya tahan tubuh sehingga akan mudah terserang penyakit bahkan meninggal karena penyakit infeksi, kanker dan lain-lain.

Sampai saat ini belum ditemukan vaksin pencegahannya atau obat untuk penyembuhannya. Jangka waktu antara terinfeksi dan munculnya gejalapenyakit pada orang dewasa memakan waktu rata-rata 6-10 tahun. Selama kurun waktu tersebut walaupun tampak sehat, baik secara sadar maupun tidak, yang bersangkutan dapat menularkan virus HIV kepada orang lain. Virus HIV ditularkan kepada orang sehat terutama melalui hubungan seksual; disamping

itu juga bisa melalui darah/produk darah (misalnya transfuse darah, suntikan, tindakan medis dan lainnya) dan dari ibu yang terinfeksi kepada janin/bayinya.

AIDS secara nyata ada di Indonesia dari pemeriksaan darah yang sangat terbatas diketahui keberadaannya di 14 Provinsi. Kasus pertama ditemukan pada tahun 1987, dan 7 tahun kemudian (Maret 1997) dilaporkan bahwa penderita AIDS berjumlah 55 orang.

Jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2017 tercatat ada 10 kasus dimana 6 (enam) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Dharmasraya sudah ada warga yang terkena HIV/AIDS walaupun masih dalam jumlah yang sedikit namun memiliki kasus penderita HIV/AIDS di Indonesia periode 1987 hingga 1997 maka hal ini cukup mengkhawatirkan bagi generasi penerus.

E. Keluarga Berencana

Salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah program KB yang telah dicanangkan sejak tahun 1990-an. Program KB lebih menekankan kualitas keluarga daripada kuantitasnya, yaitu hanya terdiri dari ayah, ibu dan 2 (dua) orang anak. Semakin banyak jumlah anak berarti semakin besar tanggungan kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan anggota rumah tangga. Oleh karena itu pembatasan jumlah anak melalui KB perlu diperhatikan agar tercapai keluarga yang sejahtera.

Tabel 4.4

Jumlah Peserta KB Aktif di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

Jenis Kelamin	Jenis KB						Jumlah
	MOW	IUD	IMP	ST	Pil	Kondom	
Laki-laki	39	–	–	–	–	1312	1351
Perempuan	1078	1578	6591	22370	5679	–	37295

Sumber : Bidang KB Dinas SosP3APPKB Kabupaten Dharmasraya

F. Penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA)

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada tahun 2017, terdapat 12 orang pengguna NAPZA aktif yang tercatat di Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, dimana semua pengguna NAPZA tersebut merupakan laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan di Kabupaten Dharmasraya belum ada yang terindikasi pengguna NAPZA.

BAB V

KETENAGAKERJAAN

Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja tidak hanya bertujuan untuk membantu memenuhi perekonomian rumah tangga dan memperbaiki tingkat kesejahteraannya, tapi juga untuk mencapai kepuasan individu. Oleh karena itu keterlibatan perempuan dalam urusan ketenagakerjaan dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan. Semakin banyak perempuan yang bekerja, secara tidak langsung dapat menunjukkan semakin banyak perempuan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Secara umum penduduk yang telah memasuki usia kerja diharapkan mampu terlibat secara aktif dalam kegiatan perekonomian, demikian pula dengan penduduk perempuan. Penduduk yang telah memasuki usia kerja tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

A. Penyedia Lapangan Kerja

Masyarakat Kabupaten Dharmasraya merupakan masyarakat yang homogen dalam hal jenis pekerjaan, mulai dari sektor formal maupun non formal. Namun bagi para pencari kerja, mereka membutuhkan adanya penyedia lapangan pekerjaan demi mengaktualisasikan diri dan mencukupi kebutuhan. Bagi pencari kerja (pencaker) yang memprioritaskan kerja di sektor formal maka mereka akan mengurus kastu pencari kerja (AK1) di Dinas Transmigrasi

dan Tenaga Kerja (Dinas Transnaker) Kabupaten Dharmasraya dan sedangkan yang tidak memprioritaskan bekerja di sektor formal tidak akan terdaftar sebagai pencaker di Dinas Transnaker.

Tabel 5.1

Pencari Kerja Terdaftar Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2017

KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
15 – 19	100	78	178
20 – 29	327	375	702
30 – 44	10	21	31
45 – 54	-	-	-
JUMLAH	437	474	911

Sumber : Dinas Transnaker Kabupaten Dharmasraya

Dari tabel 5.1 diatas terlihat bahwa pencaker lebih banyak dari jenis kelamin perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa minat perempuan dalam mencari kerja di sektor formal lebih tinggi dibandingan pencaker laki-laki. Dari sektor formal, para pencaker ada yang bekerja di pemerintahan, BUMN, BUMD, dan perusahaan.

Di Kabupaten Dharmasraya terdapat cukup banyak perusahaan besar yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan hasil alam seperti yang tertera dalam tabel di berikut ini :

Tabel 5.2

Kapasitas Perusahaan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

No.	Kabupaten	Kapasitas Perusahaan				Jumlah
		Besar	Sedang	Menengah	Kecil	
1.	Dharmasraya	19	2	8	76	105

Sumber : Dinas Transnaker Kabupaten Dharmasraya

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa di Kabupaten Dharmasraya memiliki sangat banyak penyedia lapangan kerja bagi para pencari kerja.

B. Pekerja Perempuan

Pekerja perempuan yang dimaksud adalah pekerja perempuan yang bekerja baik di sektor formal maupun informal.

Tabel 5.3

Pekerja Perempuan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

No.	Kecamatan	Jumlah Perempuan Usia > 15 Tahun	Jumlah Pekerja Perempuan Usia > 15 Tahun
1.	Koto Baru	10.881	2.050
2.	Pulau Punjung	13.995	2.767
3.	Sungai Rumbai	7.291	1.432
4.	Sitiung	9.388	2.224
5.	IX Koto	2.938	866
6.	Timpeh	5.543	731
7.	Koto Salak	6.303	1.434
8.	Tiumang	4.482	828
9.	Padang Laweh	2.008	318
10.	Asam Jujuhan	2.775	643
11.	Koto Besar	9.196	1.505
Jumlah		74.800	14.798

Sumber: Dinas Transnaker Kabupaten Dharmasraya

Dari data diatas terlihat bahwa pekerja perempuan terbanyak di Kecamatan Pulau Punjung dan yang paling sedikit di Kecamatan Padang Laweh.

BAB VI

PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK

Hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan diatur oleh negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, perempuan diberikan kebebasan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan di semua bidang dan sektor. Tidak hanya di ranah domestic, peran perempuan juga diakui di sektor publik.

Peran perempuan di Indonesia dalam sektor publik sudah dari sebelum Indonesia merdeka bahkan pada masa kerajaan-pun perempuan sudah dapat melawan penjajah seperti Siti Manggopoh, Rohana Kudus, kemudian muncul Rasuna Said dalam Pergerakan Nasional, serta RA Kartini dan Dewi Sartika yang telah berjuang dengan keras agar perempuan mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Dari masa ke masa keterlibatan perempuan dalam sektor publik semakin meningkat. Hal itu tampak pada partisipasi perempuan menjadi anggota legislatif, eksekutif, maupun yudikatif serta partai politik.

A. Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif

Peningkatan jumlah perempuan terpilih tidak hanya menunjukkan bertambahnya minat perempuan masuk dalam dunia politik untuk menjadi wakil rakyat, namun juga dapat mengindikasikan meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa perempuan memasuki dunia politik adalah penting dan perlu didukung. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang seperti UU Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik yang menyatakan bahwa partai politik harus

memenuhi kuota 30 persen bagi perempuan dalam partai politik terutama di Lembaga Perwakilan Rakyat. Dengan adanya UU tersebut dapat dijadikan momentum yang tepat bagi perempuan untuk dapat mengangkat harkat dan martabatnya serta menunjukkan bahwa perempuan mempunyai potensi yang sama dengan laki-laki.

Partai Politik merupakan salah satu wadah dimana perempuan bisa berkiprah dalam bidang politik atau dengan kata lain untuk meningkatkan pemberdayaan politik perempuan karena partai politik menjadi salah satu jenjang bagi seseorang menjadi anggota parlemen.

Kurangnya kepercayaan diri perempuan berkompetisi dengan pria dalam dunia politik mengakibatkan keterkaitan perempuan dalam lembaga legislative masih jauh dari memadai, padahal pemilih mayoritas di Indonesia adalah perempuan.

Tabel 6.1

Jumlah Partisipasi Perempuan di Pemilihan Legislatif di Kabupaten Dharmasraya Tahun Pileg periode 2014-2019

No.	Kecamatan	Jumlah Perempuan	Jumlah Partisipasi Perempuan di Legislatif
1.	Pulau Punjung	19.339	19
2.	IX Koto	4.138	1
3.	Sitiung	12 548	17
4.	Timpeh	7 564	2
5.	Koto Baru	14 801	19
6.	Koto Salak	8 248	8
7.	Padang Laweh	2 779	0
8.	Tiumang	5 999	6
9.	Sungai Rumbai	10 157	9
10.	Koto Besar	12 584	13
11.	Asam Jujuhan	3 811	3
Jumlah		101.968	97

Namun di Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2014 hingga 2017 dari total 25 orang anggota legislative terpilih, didominasi oleh laki-laki sebanyak 24 orang dan hanya ada 1 orang perempuan yang duduk di lembaga legislatif (Komisi I DPRD Kabupaten Dharmasraya) yaitunya **Fitria Ningsih, SE** yang berasal dari Partai Hanura. Walaupun tersa masih sangat kurang, namun hal ini masih lebih baik dibandingkan Kabupaten Mentawai dan Kabupaten Solok Selatan yang tidak memiliki satu orang-pun wakil perempuan di lembaga legislatif.

B. Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif

Sejak era reformasi di Indonesia, perempuan mendapat peluang yang besar untuk jabatan politik di negara ini, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia pernah dipimpin oleh seorang presiden perempuan yaitunya Megawati Soekarno Putri.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah dibantu oleh aparat yang terdapat lembaga pemerintah. Salah satu aparat pemerintah yang ada adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagai PNS, baik laki-laki maupun perempuan dapat berperan dalam menjalankan program-program pemerintah. Jika partisipasi perempuan dibuka seluas-luasnya sebagai PNS maka program-program pemerintah dapat diarahkan pada kesetaraan gender.

Tabel 6.2

Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2017

Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
I	14	3	17
II	269	521	790
III	684	1372	2056
IV	312	415	727
Jumlah	1279	2311	3590

Sumber : BKPSDM Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Dharmasraya tahun 2017 pada table diatas dari total 3590 PNS di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 2311 PNS merupakan perempuan dan jumlah ini lebih banyak dari PNS laki-laki yang hanya 1279 orang.

C. Perempuan di Lembaga Yudikatif

Representasi perempuan di lembaga yudikatif dapat dilihat misalnya pada lembaga hukum. Representasi perempuan diperlukan pada lembaga yudikatif karena banyak persoalan hukum yang dialami perempuan yang belum mendapatkan penanganan dan perlindungan yang adil. Hal ini tidak saja karena jumlah perempuan yang sedikit di lembaga-lembaga penegakan hukum, tapi juga karena masih kuatnya bias gender di dalam lembaga yang bersangkutan maupun di dalam masyarakat.

Salah satu diantaranya adalah lembaga kejasaan. Representasi perempuan di lembaga yudikatif dapat dilihat dari jumlah perempuan yang menjadi jaksa. Data dari Kejaksaan Negeri Dharmasraya pada tahun 2017 dari total 15 orang jaksa terdapat 6 orang jaksa perempuan. Hal ini memperlihatkan tidak terlalu jauhnya jarak antara jumlah jaksa laki-laki dengan perempuan di lembaga yudikatif di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2017.

D. Organisasi Perempuan

Maraknya organisasi perempuan dalam forum-forum yang berspektif perempuan yang didominasi oleh kaum ibu-ibu mengindikasikan bahwa perempuan memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan diri dalam rangka meningkatkan perannya dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Organisasi perempuan merupakan mitra kerja pemerintah dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.

Dalam rangka meningkatkan peran dan eksistensi organisasi perempuan khususnya dalam bidang pembangunan yang berkeadilan harus dimulai dari komitmen yang tinggi melalui manajemen yang diterapkan serta peningkatan kinerja individu pada organisasi tersebut. Apabila organisasi atau kelompok-kelompok perempuan yang tergabung dalam wadah organisasi kemasyarakatan BKOW terkelola dengan baik maka pembangunan pemberdayaan perempuan akan bisa lebih eksis dan lebih optimal. Pada tahun 2017, di Kabupaten Dharmasraya terdapat sebanyak 21 kelompok organisasi perempuan.

BAB VII

KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal dan Nonformal

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir hingga sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

PAUD merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar kearah pertumbuhan dan 5 (lima) perkembangan, yaitunya Perkembangan moral dan agama, perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan/kognisi (daya pikir dan daya cipta), sosio emosional (skap dan emosi), bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

PAUD diselenggarakan dalam 2 (dua) jalur pendidikan, yaitunya jalur formal dan jalur nonformal. Jenis PAUD formal seperti : Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA). Sedangkan jenis PAUD nonformal seperti :

Tempat Penitipan Anak (TPA), Taman Anak Sejahtera (TAS), Kelompok Bermain, dan Satuan Paud Sejenis (SPS).

Di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2017 sudah terdapat 21 PAUD baik dari jenis formal maupun nonformal. Perkembangan ini menunjukkan bahwa minat orangtua untuk memasukkan anak ke pendidikan pra sekolah cukup tinggi mengingat pentingnya memberikan ransangan suasana bersosialisasi dan belajar kepada anak sedari usia dini.

B. Kepemilikan Akte Kelahiran

Akte kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang lahir harus dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berguna sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang No 34 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa setiap bayi yang lahir dilaporkan oleh penduduk kepada instansi terkait selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

DHARMASRAYA

Tabel 7.1**Jumlah Anak berumur 18 Tahun dengan kepemilikan akte kelahiran di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017**

No.	Kabupaten	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Dharmasraya	3.075	3.090	6.165

C. Perlindungan Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan hingga saat ini masih terjadi dalam berbagai pola dan modus yang tidak banyak mengalami pergeseran. Hanya saja kesulitan dalam mendapatkan data yang benar-benar akurat masih ditemui, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pada korban kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam keluarga, biasanya sang istri dan anak tidak ingin masalah pribadinya diketahui oleh publik. Perasaan malu yang menimpakorban atau keluarganya membuat mereka memilih untuk berdiam diri. Lebih-lebih si korban merasa terancam jiwanya sehingga tidak mempunyai keberanian untuk melaporkan kejadian yang dilakukan oleh pelaku apalagi jika pelakunya adalah suami mereka sendiri.

Jumlah perempuan korban kekerasan di Kabupaten Dharmasraya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 tercatat ada 12 kasus kekerasan terhadap perempuan yang telah didampingi. Korban KDRT mendominasi dengan 9 orang korban dilanjutkan dengan korban kekerasan fisik 3 orang dan 1 orang korban kekerasan seksual.

Selain memberikan perlindungan kepada perempuan, kita tidak boleh melupakan makhluk lemah titipan Tuhan yang juga membutuhkan perlindungan kita bersama. Memberikan perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban

setiap warga negara untuk menjaga keberlangsungan negara dan bangsa di masa yang akan datang, juga demi menjalankan amanat Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang

merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak itu terdiri dari 6 (enam) kluster dan kesemua kluster tersebut wajib dilindungi hak-haknya.

Anak jalanan merupakan anak yang tinggal di lahan kosong atau fasilitas umum tanpa adanya pengawasan dari orangtua maupun kerabat, sedangkan anak terlantar merupakan anak yang karena suatu sebab tidak mendapatkan hak yang seharusnya diberikan oleh orangtua baik kebutuhan fisik, jasmani, maupun rohani. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang harus berurusan dengan hukum sebagai akibat dari perbuatan diri sendiri maupun orang lain, sehingga ABH terdiri dari anak korban, saksi dan anak pelaku.

Di Kabupaten Dharmasraya terdapat semua kluster tersebut. Anak jalanan dan anak terlantar sudah berada dalam pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKSA) atau lebih umum disebut Panti Asuhan Anak, sedangkan anak dengan balita, balita terlantar dan disabilitas juga mendapat perhatian khusus. Akan tetapi yang menjadi perhatian lebih dari publik adalah ABH dan Anak yang Membutuhkan Perlakuan Khusus (AMPK).

Pada tahun 2017 terdapat 24 anak ABH dan AMPK yang sudah mendapatkan pendampingan dari Pekerja Sosial dan Aparat Penegak Hukum. Dari 24 anak tersebut, terdapat 14 orang anak yang menjadi korban (11 orang korban pencabulan dan 2 orang korban kekerasan, dan 1 orang korban KDRT),

4 orang saksi, dan selebihnya menjadi pelaku. Untuk kasusnya-pun beragam, mulai dari pencabulan, pencurian, penambangan dan penebangan hutan liar.



BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan data yang telah dikemukakan pada buku profil gender dan anak di Kabupaten Dharmasraya tahun 2018 maka yang dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dari tahun ke tahun tingkat kesadaran perempuan dalam berpartisipasi aktif dalam kehidupan bahkan berbakti berbangsa dan bernegara dalam rangka memperbaiki kesejahteraan kehidupannya semakin meningkat. Kaum perempuan jika diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki maka akan menjadi potensi yang berharga dan dapat dikembangkan guna pembangunan daerah dari sisi ekonomi, sosial, hingga politik.

Selain perempuan, perhatian bersama masyarakat dan pemangku kebijakan baik di level pemerintah maupun adat dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam kondisi masyarakat yang kondusif ditambah dengan perhatian pemerintah dalam memberikan kesempatan bagi anak memperoleh hak-hak mereka maka anak akan berkembang menjadi generasi penerus yang nantinya akan memajukan daerah.

Maka dari itu, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah diharapkan mampu mengakomodir kepentingan perempuan dan anak karena mereka adalah potensi daerah yang mampu memberikan dampak yang signifikan jika mampu diberdayakan sesuai pada kodratnya.

B. SARAN

1. Para pengambil kebijakan di Kabupaten Dharmasraya diharapkan mempertimbangkan isu gender dan perlindungan anak dalam rangka menyusun pembangunan di segala bidang,
2. Tingkat pendidikan perempuan di Kabupaten Dharmasraya yang cukup baik belum mampu mengakomodir kesempatan kerja bagi mereka sehingga diharapkan adanya kebijakan dalam rangka peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan,
3. Semua Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Dharmasraya harus mampu bekerjasama dalam memberikan perlindungan terhadap anak karena perlindungan anak membutuhkan sinergi semua unsure agar mereka terlindungi serta hak-hak mereka terpenuhi,
4. Dinas Sosial Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) Kabupaten Dharmasraya melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan dapat mendorong partisipasi perempuan di sector publik, terutama di bidang politik dan organisasi masyarakat,
5. Dinas Sosial Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) Kabupaten Dharmasraya bekerja sama dengan dinas kesehatan dalam rangka upaya promotif dan prevent serta meningkatkan kualitas upaya kuratif dan rehabilitatif kesehatan, sehingga kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Dharmasraya lebih optimal.